



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SENO DARMAWAN PANJAITAN**
2. Jabatan : **KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**
3. NHK : **859991**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **981.000.000**

1. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 131 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 389 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 301.000.000
5. Tanah Seluas 19700 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 506.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **166.300.000**

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **45.600.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **551.346.943**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.744.246.943
III. HUTANG	Rp.	91.512.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.652.734.443

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.